

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN IBU MARIA CATRINA SUMARSIH

Pembukaan: **Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Sumarsih, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan, yang dikenal sebagai Wawan korban Semanggi I dan salah satu penggagas Aksi Kamisan. Wawancara berlangsung pada [6 Juni 2024 depan istana negara] untuk menggali lebih jauh sejarah terbentuknya Aksi Kamisan, peran organisasi pendukung, serta pandangan kritis terhadap respon negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.**

Pewawancara:

Selamat sore, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini.

Ibu

Sumarsih:

Iya, selamat sore juga. Sama-sama, Nak. Silakan, mau tanya-tanya apa?

Pewawancara:

Saya sedang meneliti tentang Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM berat. Saya ingin mendengar langsung dari Ibu, sebagai salah satu tokoh penting yang sejak awal terlibat.

Ibu

Sumarsih:

Wah, ya silakan saja. Saya senang kalau ada yang tertarik memahami perjuangan kami. Apa yang mau kamu ketahui?

Pewawancara:

Pertama-tama, Kalau dilihat dari awal, apakah ada organisasi lain yang ikut terlibat dalam Aksi Kamisan?

Ibu

Sumarsih:

Oh iya, jadi awalnya itu kan organisasinya namanya JSKK ya, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Lalu ada juga Paguyuban. Seiring waktu, beberapa organisasi lain ikut terlibat seperti JRKI, KONTRAS, Amnesty International, YLBHI, LBH Jakarta, PBHI Nasional, dan Imparsial.

Pewawancara:

Wah, jadi cukup banyak ya lembaga yang terlibat?

Ibu

Sumarsih:

Iya, banyak lembaga yang kemudian ikut berperan, terutama dalam penyelenggaraan Aksi Kamisan.

Pewawancara:

Mereka ikut secara langsung dalam aksi?

Ibu

Sumarsih:

Sebenarnya mereka ikutnya mengalir saja, jadi tidak selalu semua hadir. Tapi dalam evaluasi Aksi Kamisan ke-500 misalnya, ada pembagian tugas yang jelas. KONTRAS biasanya yang bawa perlengkapan aksi, Amnesty International bawa sound system dan menyiapkan surat untuk Presiden. Imparsial mengurus keamanan, karena kadang-kadang aksi ini sempat dilarang.

Pewawancara:

Kalau Instagram, ada juga ya?

Ibu

Sumarsih:

Ada, tentu saja.

Pewawancara:

Terima kasih sebelumnya. Namanya siapa ya, Bu?

Ibu

Sumarsih:

Saya Sumarsih.

Pewawancara:

Ibu Sumarsih. Sebelumnya Ibu ikut juga dalam koordinasi sebelum Aksi Kamisan

terbentuk tahun 2007?

Ibu

Oh iya. Saya ibunya Wawan. Dia ditembak pada 13 November 1998. Saat itu saya sempat cuti besar dari pekerjaan saya di Sekretariat Jenderal DPR. Setelah kembali bekerja Februari 1999, saya mulai mencari tahu kenapa anak saya bisa ditembak. Saya ingin tahu bagaimana aparat menghadapi mahasiswa yang berdemo. Jadi saya memutuskan turun ke jalan.

Pewawancara:

Turut aksi ya, Bu?

Ibu

Iya. Bulan April 1999 saya ikut aksi damai yang diadakan aktivis perempuan di Bundaran HI, waktu itu setiap hari Jumat. Di sana saya bertemu dengan anak-anak Tim Relawan Kemanusiaan—Wawan dulu juga anggotanya. Dari sana saya diajak hadir dalam pertemuan korban Mei 1998. Lalu terbentuklah paguyuban, namanya *Paguyuban Keluarga Korban Tragedi Berdarah 13-15 Mei, Semanggi I, dan Semanggi II*, bersama Tim Relawan Kemanusiaan. Kami berjuang mencari kebenaran.

Pewawancara:

Lalu berlanjut ke Aksi Kamisan?

Ibu

Iya, setelah terbitnya UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000, kami mulai mencari keadilan. Kami juga didampingi berbagai lembaga seperti KONTRAS. Awalnya banyak komunitas yang datang ke rumah—dari KONTRAS, dari partai seperti PDIP, dan juga mahasiswa berbagai kampus.

Pewawancara:

Kenapa akhirnya memilih Aksi Kamisan?

Ibu

Karena kami sulit sekali mencari kebenaran dan keadilan. Akhirnya, sejak 18 Januari 2007, kami mengadakan Aksi Kamisan. Ini cara kami bertahan, mencari kebenaran, memperjuangkan keadilan, melawan impunitas, dan melawan lupa.

Pewawancara:

Selama aksi, ada respons dari pemerintah?

Ibu

Ada, tapi tidak sesuai harapan. Sejak adanya UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000, seharusnya pemerintah membawa kasus-kasus pelanggaran HAM ke pengadilan HAM ad hoc. Tapi pemerintah memilih menyelesaikan secara non-yudisial, yang kami tolak. Termasuk menolak Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.

Pewawancara:

Jadi pemerintah hanya menawarkan pemulihan tanpa pengadilan?

Ibu

Iya, mereka menawarkan bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak cukup. Contohnya, saya dulu ditawari uang duka 5 juta rupiah, saya tolak. Saya bilang, saya akan tandatangani tanda terima kalau uang itu diserahkan ke orang yang menembak Wawan.

Pewawancara:

Dan akhirnya?

Ibu

Mereka bilang susah nyari pelakunya. Saya minta diberikan ke aparat yang bertugas di Atma Jaya waktu itu, atau ke 167 prajurit yang ditahan di Kodam Jaya. Tapi setelah bertahun-tahun saya minta bukti penerimaannya ke PMI, mereka bilang lupa, tidak ada catatan. Itu yang saya sesalkan.

Pewawancara:

Jadi Ibu tetap menolak segala bantuan pemulihan?

Ibu

Iya. Karena saya memperjuangkan hak korban sesuai dengan Pasal 35 UU Pengadilan HAM: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Tapi itu hanya berlaku kalau kasus dibawa ke pengadilan. Ini ujian bagi negara, sejauh mana mau menegakkan hukum dan HAM. Saya tidak ingin menikmati bantuan itu untuk diri sendiri. Tujuan saya adalah supaya tidak terjadi pengulangan pelanggaran HAM berat di masa depan.

Pewawancara:

Waktu tahun politik kemarin, banyak yang bicara soal HAM. Tanggapan Ibu?

Ibu

Saya sadar, bagi saya Pak Jokowi itu penipu. Di Nawacita dia janji menyelesaikan pelanggaran HAM berat—Semanggi I, II, Trisakti, penghilangan paksa, kerusuhan Mei, Tanjung Priok, Talangsari, tragedi 65. Juga berjanji menghapus impunitas dan merevisi UU Peradilan Militer. Tapi kenyataannya, di periode pertama malah angkat Wiranto—yang namanya ada di berkas Komnas HAM—jadi Menkopolkam. Di periode kedua, angkat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Jadi saya menyebut Jokowi sebagai pelindung pelanggaran HAM.

Pewawancara:

Kalau dari JSKK sendiri ada isu lain yang diperjuangkan selain HAM?

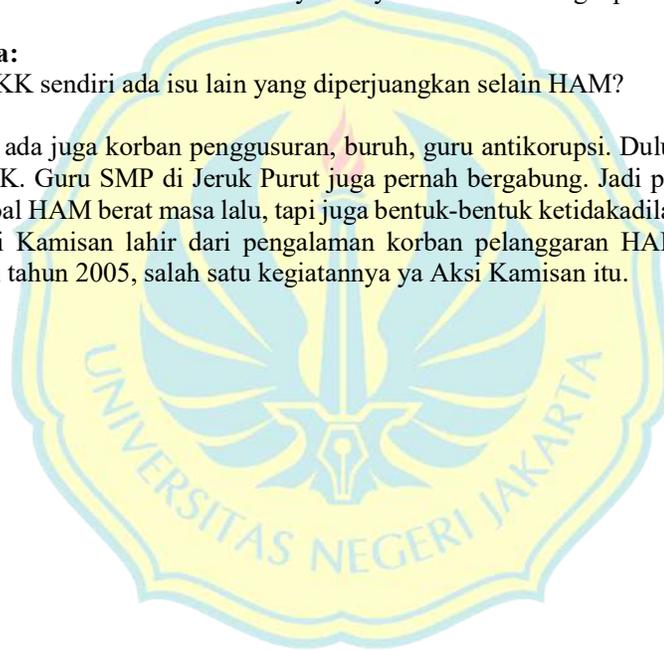
Ibu

Iya. Di JSKK ada juga korban pengusuran, buruh, guru antikorupsi. Dulu KASBI buruh juga ikut JSKK. Guru SMP di Jeruk Purut juga pernah bergabung. Jadi perjuangan kami tidak hanya soal HAM berat masa lalu, tapi juga bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Tapi memang Aksi Kamisan lahir dari pengalaman korban pelanggaran HAM berat. JSKK sendiri berdiri tahun 2005, salah satu kegiatannya ya Aksi Kamisan itu.

Sumarsih:

Sumarsih:

Sumarsih:



Intelligentia - Dignitas

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK BEDJO UNTUNG

Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari penelitian mengenai dinamika gerakan sosial yang menuntut penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam konteks Aksi Kamisan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Narasumber dalam wawancara ini adalah Bapak Bedjo Untung, seorang penyintas tragedi 1965 dan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), yang juga aktif mengikuti dan mendukung Aksi Kamisan sejak awal kemunculannya.

Dalam wawancara ini, Bapak Bedjo memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang lahirnya Aksi Kamisan, bentuk aksinya, konsistensi gerakan hingga hari ini, serta pandangan kritis terhadap respons negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Penuturan beliau menjadi bagian penting dalam merekonstruksi sejarah perjuangan korban serta perlawanan masyarakat sipil terhadap impunitas di Indonesia.

Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal [27 Mei 2025] di [Taman Ismail Marzuki], dan berlangsung dalam suasana yang hangat namun penuh refleksi kritis atas realitas sosial-politik yang terus dihadapi oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Wawancara

Pewawancara

(P):

Selamat sore, Pak Bedjo. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang dengan kami. Hari ini kami ingin menggali lebih jauh tentang perjalanan Aksi Kamisan dari awal berdirinya hingga perkembangannya hari ini.

Bedjo

Untung

(B):

Selamat sore. Terima kasih juga. Ini hal yang penting untuk terus dibicarakan dan diingat oleh masyarakat luas.

I. Latar Belakang Aksi Kamisan

P:

Pak Bedjo, bisa Bapak ceritakan bagaimana latar belakang munculnya Aksi Kamisan?

B:

Aksi Kamisan lahir dari rasa frustrasi yang kemudian berubah menjadi tekad kolektif. Sekitar tahun 2006–2007, keluarga korban pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965, penghilangan paksa aktivis 1997/1998, Tragedi Semanggi, Trisakti, Marsinah, dan lainnya, mulai sadar bahwa negara tak kunjung menyelesaikan janji keadilan. Janji terus diberikan, tapi tidak ada tindakan nyata.

Akhirnya, bersama para pejuang HAM dan organisasi seperti KontraS, kami memutuskan untuk membuat sebuah aksi yang konsisten, tenang, tapi kuat secara simbolik. Maka lahirlah Aksi Kamisan, sebuah aksi diam setiap hari Kamis di depan Istana Negara.

II. Awal Mula Aksi Kamisan (2007)

P:

Kapan tepatnya Aksi Kamisan dimulai?

B:

Aksi pertama dilakukan pada 18 Januari 2007, dimulai oleh keluarga aktivis yang hilang seperti ibu Sumarsih, ibu dari Wawan, dan beberapa orang tua korban lain.

Saya hadir juga saat itu. Kami berdiri di depan Istana dengan membawa payung hitam dan foto-foto korban. Kami berdiri satu jam, dalam diam, tanpa orasi atau keributan.

Payung hitam itu menjadi simbol. Hitam melambangkan duka dan kesedihan yang belum pernah dituntaskan. Payung melambangkan perlindungan—perlindungan moral dari rakyat terhadap kekuasaan yang lalim.

III. Alasan Hari Kamis Dipilih

P:

Mengapa Aksi ini dilakukan setiap hari Kamis?

B:

Hari Kamis dipilih karena strategis. Hari itu relatif sepi dari aksi-aksi massa lainnya. Kami ingin menciptakan rutinitas yang tidak terganggu dan tidak saling bertabrakan dengan agenda kelompok lain. Kamis juga dekat dengan akhir pekan, jadi memungkinkan kehadiran dari luar kota. Kamis menjadi penanda kontinuitas—bahwa aksi ini akan terus hadir, apapun kondisinya.

IV. Respons Pemerintah dan Aparat

P:

Bagaimana respons pemerintah atau aparat saat Aksi Kamisan baru dimulai?

B:

Di awal, kami sering mendapat intimidasi. Ada petugas yang memaksa kami bubar, memfoto, bahkan menyuruh pulang. Tapi karena kami aksi damai, tidak melanggar hukum, perlahan-lahan aparat mulai "membiarkan". Meski begitu, tidak berarti negara memperhatikan tuntutan kami. Bahkan sampai hari ini, belum ada langkah konkret.

Pejabat pernah datang, tapi hanya sebatas basa-basi. Aksi kami dianggap angin lalu. Tapi kami tetap berdiri. Karena yang kami perjuangkan bukan popularitas, tapi keadilan dan kebenaran sejarah.

V. Perkembangan Aksi Kamisan (2007–2019)

P:

Bagaimana Aksi Kamisan berkembang dari waktu ke waktu?

B:

Yang paling luar biasa adalah konsistensinya. Setiap Kamis, selama 17 tahun lebih, aksi ini tidak pernah berhenti. Hujan deras, panas terik, bahkan saat Jakarta banjir pun kami tetap datang.

Seiring waktu, anak-anak muda mulai bergabung. Mahasiswa dari UI, UIN, Unpar, ISI, dan banyak kampus lainnya mulai mengisi barisan. Komunitas seni, pegiat HAM, bahkan warga asing ikut berdiri di Kamisan.

Mulai sekitar tahun 2012, Aksi Kamisan juga menyebar ke kota-kota lain: Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, bahkan di luar negeri. Aksi ini menjadi gerakan simbolik nasional dan internasional.

VI. Era Pemerintahan Jokowi

P:

Apakah ada perubahan respons negara selama pemerintahan Presiden Jokowi?

B:

Awalnya kami berharap. Jokowi berjanji pada masa kampanye 2014 akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tapi harapan itu pupus. Bahkan, Jokowi menunjuk Wiranto—yang kami anggap terlibat dalam pelanggaran HAM—sebagai Menkopolkam. Itu menyakitkan.

Negara lebih mendorong penyelesaian non-yudisial, yang bagi kami tidak menyentuh akar masalah. Tidak ada pengadilan, tidak ada pengakuan tanggung jawab. Korban seperti diredam dengan “seremonial” semata.

VII. Aksi Kamisan Saat Pandemi

P:

Bagaimana Aksi Kamisan bertahan di masa pandemi COVID-19?

B:

Selama pandemi, kami tidak bisa aksi fisik. Tapi semangat tidak mati. Kami beralih ke media sosial. Menggelar Aksi Kamisan daring, membuat poster digital, mengadakan diskusi publik, dan menyebarkan cerita-cerita korban.

Anak muda kembali ambil peran besar di sini. Mereka kreatif, menggunakan seni, ilustrasi, bahkan video pendek untuk menyampaikan pesan. Aksi Kamisan hidup di dunia maya, bukan hanya di jalan.

VIII. Aksi Kamisan Hari Ini (2023–2025)

P:

Bagaimana situasi Aksi Kamisan saat ini?

B:

Tetap berjalan. Tiap Kamis, kami masih hadir di depan Istana. Bahkan ketika jumlahnya kecil, semangatnya tetap besar. Yang menggembirakan adalah banyak wajah muda yang kini menjadi penggerak.

Aksi Kamisan hari ini bukan hanya aksi diam, tapi juga ruang edukasi publik. Diskusi terbuka, pertunjukan seni, pameran foto, semuanya tumbuh dari semangat Kamisan. Tapi esensinya tidak berubah: menuntut keadilan dan melawan lupa.

IX. Harapan dan Penutup

P:

Apa harapan Bapak terhadap masa depan Aksi Kamisan?

B:

Saya berharap Aksi Kamisan tidak berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kami, para korban, mungkin tidak bisa melihat keadilan itu dalam hidup kami. Tapi generasi muda harus teruskan.

Ingatlah, negara bisa lupa, tapi rakyat jangan. Aksi Kamisan adalah suara nurani. Selama ketidakadilan masih ada, Kamisan harus terus hidup.

P:

Terima kasih banyak, Pak Bedjo, atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga ini. Semoga perjuangan ini terus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat.

B:

Terima kasih kembali. Semoga suara-suara korban tidak pernah padam

Aksi Diam Serba Hitam

Pengunjuk rasa dari Jaringan Solidaritas Keluarga Korban melakukan aksi diam dengan membawa foto korban pelanggaran hak asasi manusia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1).



PELANGGARAN HAM

Surat Komnas HAM kepada Presiden Dikirim 2 Bulan Lalu

JAKARTA, KOMPAS — Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata sudah dikirim dua bulan lalu, tepatnya pada 27 November 2006. Bahkan, pada 6 November 2006, Komnas HAM juga ber-kirim surat kepada Presiden untuk meminta bertemu, tetapi belum ada tanggapan.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara ketika ditanya *Kompas*, Rabu (24/1), mengatakan, Komnas HAM sudah mengirim dua surat kepada Presiden dua bulan lalu. "Tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya," kata Abdul Hakim menanggapi pernyataan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng yang mengatakan, Presiden akan memanggil Jaksa Agung setelah Presiden menerima surat dari Komnas HAM perihal hasil penyelidikan kasus penculikan.

Dalam suratnya, Abdul Hakim meminta Presiden memerintahkan aparat negara yang berwenang untuk mengusut ketidakpastian keberadaan dan/atau nasib 13 korban penculikan. "Aparat negara harus menemukan mereka dan mengembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan apa pun," tulisnya.

Dihubungi terpisah, Andi Mallarangeng menyatakan, pihaknya tidak mengetahui bahwa sudah ada dua surat dari Komnas HAM soal laporan tentang HAM dan keinginan Komnas HAM bertemu dengan Presiden Yudhoyono.

"Kalau mengenai surat-menyurat dengan Presiden Yudhoyono, saya kurang mengetahui. Surat-menyurat itu ditangani Menteri Sekretaris Negara, jubar kurang mengetahuinya. Coba tanyakan Pak Yusril (Mensesneg)," ujar Andi. (BAR/BDM)

KORUPSI UNHAS

Kejati Sulsel Temukan Banyak SPPD Fiktif

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yakin atas penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Achmad Ali saat menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanaddin, Makassar. Hal ini disebabkan jaksa menemukan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif.

Kepala Kejati Sulsel Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (1/2), mengemukakan, Februari ini berkas perkara kasus itu dilimpahkan ke penuntutan, bahkan diharapkan selangkas ke pengadilan.

Achmad Ali dan Alimuddin Karim, bendahara Fakultas Hukum Unhas, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi yang terjadi tahun 1999-2001. Menurut Masyhudi, dugaan korupsi itu dilakukan tersangka dengan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya, dilakukan dengan menandatangani SPPD yang sebagian besar fiktif. Kerugian negara akibat perbuatan tersangka itu sebesar Rp 211 juta dan masih akan dikordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebaliknya, Maqdir Ismail, penasihat hukum Achmad Ali, menyatakan, perkara itu dipaksakan. Hal ini disebabkan tak ada temuan BPKP yang menyebutkan ada penyimpangan selama kliennya menjadi dekan di Unhas. BPKP

pun menyatakan tak ada kerugian negara dalam kasus SPPD itu.

Menurut Maqdir, SPPD yang dipersiapkan Kejati Sulsel itu juga sudah dipertanggungjawabkan dan tak ada persolan. Selain itu, tanda tangan Achmad Ali dalam sejumlah SPPD itu palsu. Hal ini diperkuat dengan laporan dari Laboratorium Forensik Polri.

Maqdir mengakui pula, Alimuddin sudah mengakui memalsukan tanda tangan kliennya kepada penyidik. Pengakuan itu disampaikan kepada sejumlah kalangan di Unhas pula.

Masyhudi juga mengemukakan, Alimuddin yang kini ditahan penyidik sempat pasang badan dengan mengaku SPPD itu ditandatangani. Namun, penyidik yakin akan keterlibatan Achmad Ali dalam perkara ini karena dari tanda tangan yang tertera di 152 SPPD, sekitar 140 di antaranya identik dengan tanda tangan Achmad Ali.

"Dari hasil laboratorium forensik, 140 tanda tangan ini identik dengan tanda tangan Achmad Ali. Ini bukti kuat bagi penyidik," katanya.

SPPD fiktif, jelas Masyhudi, antara lain terjadi karena sebenarnya tak ada perjalanan dinas seperti yang dilaporkan. Ada juga yang biaya perjalanannya ditanggung pengundang, tetapi masih ditagihkan ke Unhas. Jaksa juga menemukan bukti aliran dana Rp 211 juta. (DDR/THA)

PEMBUNUHAN MUNIR

Suciwati Ajukan 17 Bukti Kelalaian Garuda

JAKARTA, KOMPAS — Istri pejuang hak asasi manusia Munir, Suciwati, mengajukan 17 bukti berupa dokumen dan kesaksian, yang menunjukkan ketidakprofesionalan PT Garuda Indonesia. Suciwati juga menyerahkan rekaman audiovisual yang menguak indikasi "ketidaklaziman" tentang keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto di pesawat yang ditumpangi Munir.

Bukti-bukti tersebut diserahkan kuasa hukum Suciwati dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Direktur LBH Jakarta Asfinawati, yang juga kuasa hukum Suciwati, sekuat tenaga menjelaskan, bukti-bukti itu dimaksudkan untuk mendukung dalil utama pengugat, yaitu kelalaian PT Garuda dalam hal pengawasan makanan dan minuman, kelalaian dalam penanganan sakitnya Munir, keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto yang menggunakan surat palsu, dan perpindahan

tempat duduk.

Salah satu bukti yang diajukan Asfinawati adalah dokumen hasil investigasi internal PT Garuda. Dalam dokumen tersebut, PT Garuda mengakui adanya kesalahan, di antaranya ketidaklaziman alat medis yang digunakan untuk menanganai Munir (tak dibungkus), pilot yang tidak berkomunikasi dengan petugas *ground officer* untuk mengonsultasikan keadaan Munir, serta ketidakmengertian kru akan aturan internasional.

Selain itu, Asfinawati juga menyerahkan rekaman Indra Setiawan mengakui adanya ketidaklaziman terkait keluarnya surat pengisian dan surat tugas bertanggal mundur untuk Pollycarpus. Rekaman tersebut merupakan tayangan salah satu televisi swasta pada 5 Maret 2005.

Setelah menerima bukti-bukti tersebut, Ketua majelis hakim Andriani Nurdin menunda sidang hingga 8 Februari 2006. Agenda sidang ke-2 adalah pemeriksaan bukti dan saksi. (ANA)

Jangan Diam



Jaringan Solidaritas Keluarga Korban kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2). Mereka menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.

DUGAAN KORUPSI

Gubernur Jawa Tengah Diperi

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Kamis (1/2), diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Mardiyanto, yang tak didampingi penasihat hukum, diperiksa selama lebih kurang 13 jam.

Saat ditemui sesuai diperiksa KPK, sekitar pukul 21.00, Mardiyanto enggan memberikan komentar. Ia hanya tersenyum dan melambatkan tangan serta langsung menuju mobil yang menjemputnya.

Sebenarnya, selain Mardiyanto, KPK juga memanggil Gubernur Riau Rusli Zainal dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan. Mereka diminta keterangan berkaitan dengan dugaan korupsi

pengadaan alat pemadam kebakaran. Dalam catatan *Kompas*, pengadaan peralatan itu dilakukannya setelah ada kawat dari menteri dalam negeri.

Wakil Ketua KPK Bidang 1 nindakan Tumpak Hatorang Panggabean yang ditemui selumnya membenarkan pihak tengah mengidentifikasi Gubernur Jateng itu. Namun, ia tak memberikan keterangan.

Surat Kejanggalan

Sementara itu, KPK menyidik Kejaksaan Agung terkait den penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar W di Kabupaten Tembung, teng senilai Rp 8,1 miliar. dugaan korupsi dana APBD

KASUS TRISAKTI-SEMANGGI

DPR Meminta Presiden Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

JAKARTA, KOMPAS — Peluang untuk membuka Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998 kembali terbuka lebar. Komisi III DPR, Kamis (15/2), menyerahkan surat kepada pimpinan DPR yang isinya mengusulkan kepada Presiden agar membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Surat itu pun disambut positif oleh pimpinan DPR.

Surat disampaikan Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didampingi Wakil Ketua Komisi III Djuhad Mahja dari Fraksi Partai Perseatuan Pembangunan.

Pimpinan DPR yang menerima Komisi III adalah Ketua DPR Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari F-PDIP.

Agung berharap dengan adanya surat DPR ini penanganan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan Mei 1998 yang selama ini terkatung-katung mengalami banyak kemajuan.

Saya benar-benar terkejut karena Pak Agung tadi menyatakan akan meneruskan surat Komisi III itu kepada Presiden.

Trimedya Panjaitan

"Mudah-mudahan ini berkembang lebih baik sesuai keinginan semua pihak," kata Agung usai menerima surat Komisi III.

Menurut Agung, surat Komisi III DPR ini sesuai dengan mekanisme akan ditindaklanjuti di rapat pimpinan DPR, Selasa pekan depan. Namun, dia menegaskan bahwa pimpinan DPR tidak ada alasan untuk tidak meneruskan kepada Presiden karena keputusan Komisi III sudah merupakan kesepakatan seluruh fraksi. Pimpinan DPR pun tidak

akan melempar lagi soal ini ke Rapat Badan Musyawarah.

Trimedya ketika ditemui usai acara mengaku ditemui sesuai acara mengaku yang menurut dia lugas dan tegas menyambut surat Komisi III itu.

"Saya benar-benar terkejut karena Pak Agung tadi menyatakan akan meneruskan surat Komisi III itu pada Presiden," ujarnya.

Keputusan Komisi III itu dihasilkan dalam Rapat Internal 13 Februari 2007 dan dihadiri seluruh fraksi dan mencapai kuorum. Langkah Komisi III ini sesuai penugasan Rapat Badan Musyawarah 20 Juni 2006.

Keputusan Komisi III juga sejalan dengan surat Komnas HAM yang isinya mengusulkan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta Mei 1998 dan Mei 1998, mengingat penyelidikan sudah lama diselesaikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM juga menyimpulkan terdapatnya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. (SUT)

KASUS PENCULIKAN

Keluarga Meminta Hukum Harus Adil...

Apakah Yani masih hidup atau sudah meninggal, itu urusan Tuhan. Yang penting, hukum harus adil sehingga harus ada yang dapat menjelaskan dan bertanggung jawab atas nasib Yani," kata Toeti Koto (71) dengan bergetar saat ditemui di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/2).

Toeti Koto adalah ibu dari Yani Afris, satu dari 13 orang yang dinyatakan hilang pada tahun 1997-1998. Dua belas orang lainnya adalah Yadin Muhidin, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucoq Munandar Siahaan, Hendra Hambali, dan Abdun Naser.

Toeti yakin anaknya diambil tentara seperti sejumlah aktivis lain yang hilang pada tahun itu. Sebab, dari sembilan aktivis yang dilepas, ada yang bertemu Yani saat disekap. Kepada aktivis itu, Yani bilang diambil lagi oleh tentara setelah dilepas dari Markas Kodim, Jakut.

Sementara seorang aktivis lain yang dibebaskan mengaku pernah bertemu dengan Ryan di pengekapan. "Ryan itu panggilan kesayangan saya untuk Yani," tutur Toeti.

Sampai sekarang, Toeti mengaku tak tahu mengapa Yani di-

culik. Sebab, Yani hanya sopir angkutan umum yang kebetulan ikut kampanye Partai Demokrasi Indonesia Pro-Megawati Soekarnoputri pada 26 Juni 1997. Usai kampanye, ia mendengar anaknya ditahan di Kodim Jakut. Namun, saat didatangi, Toeti diberi tahu Yani dilepas. "Setelah itu saya tidak tahu lagi di mana dia," ucap dia.

Hilangnya Yani, anak ketujuh dari 11 bersaudara, membuat Toeti harus bekerja keras hingga sekarang. Sebab, masih ada empat anak dan delapan cucu yang harus dihidupi. Setiap hari di rumahnya, Toeti membuat gambar burung Garuda dari kain yang dihiasi manik-manik.

Selain itu, Toeti juga mengorganisasi belasan penjual air minum dalam kemasan di Jalan Raya Cilincing. Setiap hari rata-rata 20 dus yang terjual. Setiap dus ia untung Rp 3.000.

"Jika Yani masih ada, saya tak perlu melakukan itu semua. Ia pasti membagikan sebagian penghasilannya kepada saudaranya," ucap dia.

Sedangkan Nurhasanah mengaku tekanan darahnya selalu naik karena stres jika mengingat Yadin Muhidin, anaknya yang hilang pada 14 Mei 1998 di kawasan Sunter, Jakut. Pada tahun pertama hilangnya Yadin,

berat tubuh Nurhasanah anjlok dari sekitar 80 kilogram menjadi 43 kilogram. Enam bulan pertama sejak Yadin hilang, ia tak mau makan.

Stres yang lebih berat dialami Umar, suami Nurhasanah. "Saya amir saya sampai sering memeluk tiang listrik sambil berteriak-teriak. 'Ini anak-saya, ini anak saya'. Ia tiba-tiba juga sakit darah tinggi dan ginjal sehingga tahun 2002 harus berhenti bekerja di Asem Reges, Jakarta Barat," kenang Nurhasanah tentang suaminya yang akhirnya meninggal pada tahun 2003.

Pada awal Yadin hilang, Nurhasanah mengaku, pada tengah malam sering ada orang menelepon dan mengaku anaknya akan kembali jika ada uang Rp 5 juta. Tetapi, saat ditanya lebih jauh, telepon itu ditutup.

Saat ini, untuk hidup Nurhasanah hanya mengandalkan bantuan dari anak sulungnya yang bekerja di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur.

"Usman Hamid (Koordinator Kontras) pernah memberi tahu di luar negeri orang seperti saya ini setiap bulan mendapat kompensasi," kata Nurhasanah. Namun di Indonesia, jangankan kompensasi, kejelasan nasib Yadin pun tak jelas. (M HERNOW)

PELANGGARAN HAM

Penuntasan Kasus Munir Dinilai Tidak Serius

JAKARTA, KOMPAS — Komite Solidaritas untuk Munir kembali mempertanyakan komitmen serta keseriusan pemerintah dan juga DPR terkait dengan upaya penuntasan dan pengungkapan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, yang sampai saat ini dinilai tidak kunjung menemui titik terang.

Dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, Rabu (21/2), komite beserta sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), rohaniawan, serta perwakilan keluarga dan korban pelanggaran HAM mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak juga menindaklanjuti lima butir rekomendasi Tim Kasus Munir DPR.

Turut hadir dalam jumpa pers itu istri Munir, Suciwati; mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir, Asmara Nababan dan Usman Hamid; rohaniawan Romo Sandyawan Sumardji; dan Koordinator Human Rights Working Groups Rafendi Djamin.

"Jangan sampai masyarakat menilai janji atau omongan Presiden Yudhoyono hanya upaya bergenit-genit mengulur waktu supaya masyarakat terkena apa yang disebut amnesia publik. Cara seperti itu sudah tak laku lagi, masyarakat sekarang sudah berpikiran kritis," ujar Sandyawan.

Tidak cuma itu, ia juga mengingatkan, jika pemerintah tidak bisa memenuhi semua janjinya untuk menuntaskan kasus tersebut, kondisi seperti itu bisa saja dikategorikan sebagai bentuk kebohongan publik.

Dalam kesempatan sama, Asmara Nababan juga memperta-



KONTRAS

Munir

nyakan sikap DPR. DPR dinilai sama sekali tidak bersikap kritis dan terkesan mendiamkan saja sejumlah rekomendasinya yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Dalam jumpa pers, Suciwati juga menyampaikan rencananya memenuhi undangan sejumlah kalangan, termasuk parlemen Australia. Didampingi Usman Hamid, Suciwati berangkat Rabu dan akan berada di Australia selama 10 hari. Suciwati mengaku tidak merasa kepergian dirinya ke Australia bertujuan menjelekkan Indonesia dengan menginternasionalisasikan kasus Munir.

Secara terpisah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, kasus pembunuhan Munir belum selesai. Kejaksaan Agung tetap mengajukan peninjauan kembali karena putusan Mahkamah Agung atas Pollycarpus Budihari Priyanto belum tuntas.

"Ngambang. Kalau dia (Pollycarpus) terbukti memalsu surat jalan. Terus apa motifnya, tidak terbuka. Kalau kita yakin," kata Jaksa Agung (DWA/IDR)

JAYANTO

on
)enyu-
, per-
oleh
abung
ig di-me-
Jen-
Dep-
minta
mbali
ggota

ituannya sebelum yang menyebut-nyebut meminta KPR itu. Presiden 2003, agar ada yang sama dalam n terkait pembelian baurnya. Yusril lakil Presiden 6, 21-22/22), is penunjukkan alat pe-din menarik, i itu betul, penelitian 34 miliar atanya. amat te-yatakan mbelian alu ma-

Hutomo, korban stigma peristiwa 1965 yang terdampar dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, mengamati kliping berbagai koran dan majalah yang memuat tulisan seperti pelanggaran hak asasi manusia dan proses penyelesaiannya yang dipasang di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (22/2).

PELANGGARAN HAM

Korban Tanjung Priok Merasa Disamakan PKI

JAKARTA, KOMPAS — Stigma PKI ternyata tidak hanya dirasakan eks-tapol/napol peristiwa G30S. Stigma tersebut juga melekat pada korban peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat Tanjung Priok. Stigma yang melekat mengakibatkan mandeknya roda perekonomian dan sosial bagi tiap-tiap korban.

Hal tersebut dikemukakan Abdul Basyir, salah satu warga Tanjung Priok yang mengetahui kehidupan korban pascaperistiwa,

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Kesaksian itu diungkapkan dalam sidang permohonan penetapan kompensasi yang diajukan 13 korban Priok yang tidak ikut islah. Sidang dipimpin Martini Mardja.

Menurut Abdul Basyir, peristiwa Priok telah memrakorandakan kehidupan korbannya. Ia mencontohkan kehidupan Saiful, salah satu pemohon penetapan kompensasi. Dijelaskan, Saiful kehilangan pekerjaan, padahal pekerjaan itu merupakan satu-satunya sumber nafkah bagi adiknya. Selepas dari penjara, Saiful tidak kunjung mendapat pekerjaan sehingga tidak mampu membiayai sekolah adiknya. Selain kerugian ekonomi, jelas Abdul Basyir, korban Priok juga mendapat perlakuan diskriminatif.

"Dalam masyarakat, ia disejajarkan dengan PKI. Orang menilai mereka sebagai orang jahat ujar Basyir. (ANA)

T 290 KAMIS, 3 MARET 2007

POLITIK & HUKUM 3

Impian DPR Jangan Mengulur Waktu

Penentuan Pansus Penculikan Suatu Kesalahan

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pimpinan DPR menunda putusan Komisi III DPR ke Rapat Paripurna DPR sebenarnya makin memunculkan risiko pimpinan DPR terhadap pengungkapan kasus hak asasi manusia berat. Pernyataan Ketua Komisi III bahwa di sana pun sudah ada teroris yang pilirkan amat disayangkan.

Keputusan pimpinan DPR itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-100, Selasa, Rabu (22/2). Rapat paripurna ini membahas laporan Komisi III DPR tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam penanganan peristiwa 11 Maret 1998. Ketua Komisi III DPR, Wicaksono, mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.

Rapat paripurna ini harus menjadi babak terakhir untuk menyelesaikan kontroversi ini.

Keputusan pimpinan DPR itu ditentang oleh beberapa anggota DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, seperti Tono G. Hejaka di Jakarta, Rabu (22/2). Hejaka mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.

Keputusan pimpinan DPR itu ditentang oleh beberapa anggota DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, seperti Tono G. Hejaka di Jakarta, Rabu (22/2). Hejaka mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.

Keputusan pimpinan DPR itu ditentang oleh beberapa anggota DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, seperti Tono G. Hejaka di Jakarta, Rabu (22/2). Hejaka mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.



Korban tragedi Tanjung Priok, Wicaksono (kiri), dan korban Kerusuhan Mei 1998, Bayu Darwis, membawa poster "Lawan Impunitas". DPR yang terkesan memperlakukan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat sebagai kasus pelanggaran HAM yang biasa.

HAK ASASI MANUSIA

Keluarga Korban Ketuk Nurani Presiden dan DPR

JAKARTA, KOMPAS — Keluarga korban pelanggaran HAM sudah merasa lelah, tetapi mereka akan terus berjuang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan tahun, tetapi tak ada satu pun kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diselesaikan hingga kini. Mereka berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak diam.

Berawal dari itu disampaikan keluarga korban '65, Tanjung Priok, Mei 1998, dan banjir Lumpur Lapindo saat menyampaikan keribuan dalam acara Peringatan 9 Tahun Berkorban yang diadakan di Gedung DPR, Rabu (22/2). "DPR jangan diam. Sudah Peristiwa 11 Maret, DPR pun sedang. Akhirnya pun beres-beresnya," ucap Nurani, ibu dari Gusman, korban kasus Senoogy 1998. Gusman sekarang tinggal di rumah penampungan.

Keputusan pimpinan DPR itu ditentang oleh beberapa anggota DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, seperti Tono G. Hejaka di Jakarta, Rabu (22/2). Hejaka mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.



Keputusan pimpinan DPR itu ditentang oleh beberapa anggota DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrat, seperti Tono G. Hejaka di Jakarta, Rabu (22/2). Hejaka mengatakan bahwa keputusan pimpinan DPR itu adalah kesalahan yang dapat merugikan korban.

meningkatkan dengan memperbaiki berbagai hambatan usaha. Lembaga vertikal tak mendukung pemberantasan korupsi. Lembaga yang dimaksud adalah

jawab jujur. Saya ragukan itu," ujar Djoko.

Meski demikian, ia menganggap hasil survei itu masukan positif untuk MA. (INU/ANA)

PELANGGARAN HAM BERAT

Permintaan Kompensasi Korban Tanjung Priok Ditolak

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2), menolak permohonan penetapan kompensasi yang diajukan 13 korban peristiwa Tanjung Priok.

Hakim tunggal Martini Mardja menyatakan, permintaan tersebut tidak beralasan. Pasalnya, dasar pengajuan kompensasi, putusan Pengadilan HAM Ad Hoc, telah dibatalkan oleh pengadilan di atasnya, yaitu Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc dan Mahkamah Agung (MA).

Raut kecewa dan marah terlihat di wajah para pemohon. Mereka berteriak menghujat pengadilan yang dinilai tak mampu memberikan keadilan. "Sudah saya bilang, pengadilan itu dagelan." "Hakim tidak adil." Itulah antara lain umpatan-umpatan yang dilontarkan para korban.

Kuasa hukum pemohon, Haris Azhar, menyatakan, pihaknya akan mengajukan kasasi terkait dengan putusan itu. Menurut dia, banyak hal yang tidak dipertimbangkan hakim yang mendasarkan putusannya pada putusan perkara pidana Priok. "Padahal,

putusan pengadilan tak menjadi unsur pengikat diberikan atau tidaknya kompensasi," katanya.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, bukti-bukti yang diajukan pemohon, di antaranya beberapa konvensi internasional tentang pelanggaran HAM berat, dinilai tidak relevan. Hakim hanya menggunakan bukti-bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc dan MA.

Menurut Haris, ditolaknya permohonan penetapan kompensasi itu tidak menutup proses penyelesaian kasus Tanjung Priok. Kompensasi baru satu pilar penyangga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, pilar yang lain masih ada. "Ini baru soal kompensasi, belum rehabilitasi, belum lagi restitusi," ujar dia.

Sementara itu, Irta Sumirta dan Raharja (keduanya korban peristiwa Tanjung Priok) menilai putusan itu sangat tidak adil. Mereka mengaku sangat kecewa karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan faktor kemanusiaan. (ANA)

Ziarah & Wisata Paskah & Bulan Maria

RITZ HOLY EROPA LOURDES 12H

RITZ TOUR
Specialist In Ziarah Tour

Pemerintah Dinilai Tak Peduli Perkara HAM

Mahasiswa Akan Tekan DPR

JAKARTA, KOMPAS – Delegasi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia yang dipimpin Rafendi Djamin dari Human Right Working Group menilai, Pemerintah Indonesia tidak peduli pada kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.

Oleh sebab itu, mereka membawa kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) serta kasus Semanggi I dan Semanggi II ke Sidang IV Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Geneva, Swiss, yang digelar pada 12-30 Maret 2007.

Menurut Rafendi di Jakarta, Kamis (15/3), ketiga kasus yang dikenal sebagai tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) itu akan disampaikan dalam pernyataan tertulis dan pernyataan lisan. Pernyataan lisan akan diajukan 27 Maret 2007 di Kelompok Kerja Pembunuhan Kilat Dewan HAM PBB.

"Dalam forum itu, kami akan menyampaikan, DPR menjadi pelaku kejahatan impunitas. Ini karena mayoritas fraksi di lembaga itu menolak kasus TSS dibawa ke rapat paripurna hingga penyelesaian kasus itu menjadi tidak jelas," kata Rafendi.

Selain menyampaikan ke Dewan HAM PBB, kata dia, delegasi LSM Indonesia juga akan minta pelapor khusus HAM PBB untuk pembunuhan di luar hukum datang ke Indonesia guna memantau kasus TSS.

"Kami terpaksa menginternasionalisasi kasus TSS karena pemerintah tak berniat menyelesaikannya. Padahal, kami sebenarnya kasihan pada Departemen Luar Negeri karena mereka yang pertama-tama direpotkan," ucap Rafendi.

Rafendi memutarakan, DPR sebenarnya dapat berkelit dari tuduhan sebagai pelaku kejahatan impunitas jika memberikan solusi buntutnya penyelesaian kasus TSS. Solusi ini, misalnya, berupa niat DPR untuk membuat undang-undang (UU) yang menyen-

Data Singkat

- ♦ Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Korban empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas diterjang peluru aparat keamanan.
- ♦ Semanggi I, 13 November 1998, di kawasan Semanggi, Jakarta. Korban lima orang mahasiswa tewas dan 253 lainnya menderita luka-luka.
- ♦ Semanggi II, 24 September 1999 di sekitar RS Jakarta, Jalan Jend Sudirman, Jakarta. Korban lima orang tewas dan 100 lainnya luka-luka.

Sumber: Libero Kompas

takan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc bukan kebijakan politik, tetapi hukum. Dengan demikian, pembentukannya tak dilakukan presiden atas usul DPR, tetapi wewenang Mahkamah Agung setelah melihat laporan Komisi Nasional HAM.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Usakti, Alam Gaos, menyatakan tetap akan coba menekan pimpinan DPR dan Komisi III DPR, baik melalui audiensi maupun unjuk rasa agar mendorong kasus TSS diselesaikan di Pengadilan HAM Ad Hoc. "Kami masih akan melakukan walau sebenarnya sudah lama tak memercayai mereka lagi," katanya.

Presiden Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya, Jakarta, Anton Apriantoro, me-



KOMPAS/ANTON WISNU NUGROHO

Anggota Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban menggelar aksi damai kesembilan kalinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/3). **Baca juga halaman 4**

nunjukkan sikap yang sama dengan Alam Gaos, yakni masih akan mendesak DPR.

"Saya kira semua kampus akan

bersikap sama dalam persoalan ini. Dari apa yang dibicarakan selama ini, ya kurang lebih seperti itulah," ujar dia. (NWO/DWA)



Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM dan pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir tetap setia melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/4). Selain menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, Suciwati—istri almarhum Munir—mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

PEMBUNUHAN MUNIR

Polri Ajukan Tiga Bukti Baru

JAKARTA, KOMPAS — Setelah tiga bulan penyidikan, Jumat (13/4) ini Polri mengajukan sedikitnya tiga bukti baru ke Kejaksaan Agung untuk proses pengajuan kembali dalam perkara pembunuhan Munir yang diduga melibatkan Polycarpus Budihari Priyanto.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan, penetapan dua tersangka, IS dan R dari PT Garuda Indonesia, tidak terkait pemalsuan surat. Keduanya diduga terlibat dalam proses perencanaan pembunuhan Munir. "Kami tentu menyelidiki ke arah pembunuhannya. Surat digunakan untuk memperlancar," ujar Sutanto, Kamis.

Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, kedua tersangka itu terkait proses penunjukan Polly, yang sebenarnya pilot, untuk menjadi petugas *aviation security* dalam pesawat Garuda yang ditumpanginya Munir.

"Itu (penunjukan Polly) bukanujuk-ujuk, tapi ada sesuatu yang bisa kita ungkap di baliknya," katanya. Bambang menambahkan, IS dan R segera dipanggil penyidik untuk diperiksa. R merupakan seorang karyawan perempuan di Garuda.

Menurut Bambang, konstruksi kasus Munir tersebut terbagi menjadi tiga lokasi kejadian perkara. Lokasi pertama terkait serangkaian proses perencanaan pembunuhan. Lokasi kedua, eksekusi peracunan terhadap Munir, yaitu di Bandara Changi International, Singapura. Ketiga, yaitu lokasi pasca-eksekusi ketika Munir akhirnya tewas dalam pesawat Garuda Indonesia bernomor GA-974, saat penerbangan dari Singapura menuju Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda.

Bukti baru yang diajukan Polri, yang pertama terkait lokasi peracunan yang terjadi di Changi, bukan di pesawat seperti dalam perkara sebelumnya. Kedua, adanya saksi baru yang melihat Mu-

nir bersama seseorang di Bandara Changi sesaat sebelum naik pesawat. Ketiga, yaitu beberapa keterangan saksi tambahan dalam penerbangan ke Amsterdam.

Istri Munir, Suciwati, dan Koordinator Kontras Usman Hamid kemarin menemui Bambang Hendarso di Mabes Polri. Menurut Suci dan Usman, dalam pembicaraan dengan Bambang disebutkan, selain IS dan R, masih ada satu calon tersangka lain.

Deputi Human Right Working Group Choirul Anam berpendapat, kredibilitas Polri dipertanyakan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Munir.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga menegaskan, penetapan tersangka baru dalam perkara pembunuhan Munir sejauh ini belum memengaruhi pengajuan peninjauan kembali yang akan dilakukan Kejaksaan. "Bukti baru itu masih kami tunggu dari polisi. Belum kami terima," kata Ritonga, Kamis. (SF/JCS/IDR)

PEMBUNUHAN MUNIR

BIN Buka Pintu, Polri Kumpulkan Bukti

JAKARTA, KOMPAS — Badan Intelijen Negara terbuka bagi setiap upaya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Untuk keterbukaan ini, Polri tengah mengumpulkan bukti berikut keterangan untuk mengungkap misteri pembunuhan Munir.

"Mari kita kasih kesempatan polisi untuk mengusut (pembunuhan Munir). Kalau nanti sudah ada ke mana alirannya, silakan. Jika mau ke BIN tidak ada masalah," ujar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/4).

Untuk upaya saat ini, Syamsir mengemukakan, belum ada anggota BIN yang diperiksa. Ditanya soal nama berinisial BI alias Bambang Irawan, Syamsir mengaku tidak tahu. Tidak ada anggota BIN yang namanya Bambang Irawan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto mengemukakan, Polri masih terus melakukan penyidikan dan mencari alat bukti baru, seperti saksi dan alat bukti lainnya. "Kami harus cermat dan teliti. Ini kasus yang cukup lama sehingga butuh konsentrasi penuh," ujarnya.

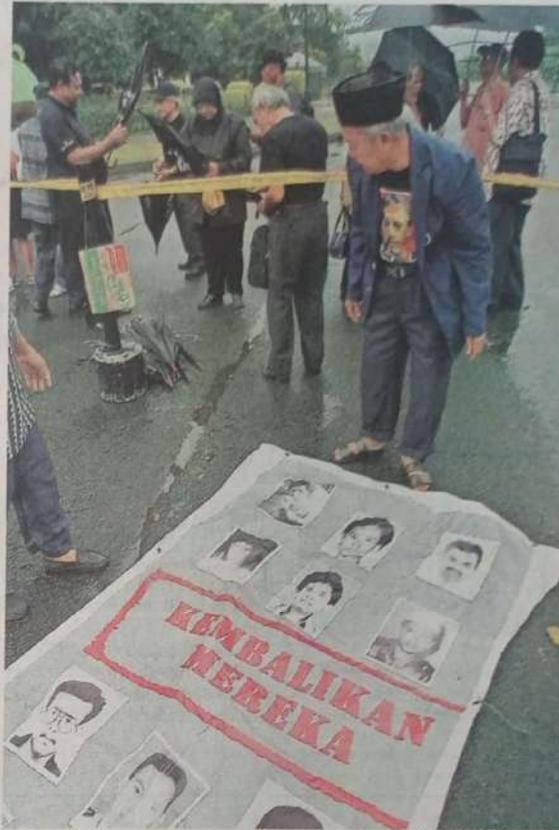
Sutanto mengemukakan, siapa pun yang terindikasi terlibat berdasarkan alat bukti, akan diperiksa. Kerja Polri didasarkan pada bukti-bukti kuat, bukan asumsi, agar dapat diterima di pengadilan.

Sementara itu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, pihaknya dan Polri intensif membahas kemungkinan diajukannya peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dengan terungkapnya bukti baru kasus pembunuhan Munir.

Namun, diakui Jaksa Agung, bahan-bahan yang akan diajukan untuk syarat PK masih kurang dan perlu dilengkapi lagi.

"Sekarang Polri sudah mendapatkan bukti baru atas kasus tersebut. Jadi, kita dengan Polri sedang mendiskusikan secara intensif," katanya.

Menurut dia, kewenangan PK memang terdapat pada Kejaksaan Agung. Tetapi, untuk mengajukan PK itu, Kejaksaan perlu bukti baru untuk syarat peng-



KOMPAS/TUTUK WIJANTORO

Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, masih terus berlangsung, seperti yang terlihat pada Kamis (19/4). Aksi itu dimaksudkan untuk menuntut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negeri ini yang dinilai jalan di tempat.

ajuan PK. Oleh karena itu, Polri harus melengkapinya kembali.

Ditanya bahan-bahan apa yang masih kurang dan perlu dilengkapi Polri, Jaksa Agung sambil tertawa menjawab, "Wah, itu rahasia dong."

Di tempat terpisah, Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group menyatakan, sejumlah perwakilan negara sahabat amat menghargai langkah polisi mengusut pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Mereka menilai, pengungkapan kasus ini memiliki arti yang sangat penting dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

"Para diplomat juga menga-

takan pentingnya dukungan politik Presiden Yudhoyono kepada polisi untuk menyelesaikan kasus ini," kata Rafendi.

Pernyataan itu diberikan setelah Rafendi bersama dengan sejumlah anggota Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bertemu dengan perwakilan dari 10 negara dan Komisi Eropa di sebuah hotel di Jakarta. Pertemuan dengan agenda utama membahas perkembangan kasus Munir ini berlangsung sekitar 1,5 jam dan bersifat tertutup.

Perwakilan negara yang hadir dalam acara itu, antara lain, dari Belanda, Swedia, Kanada, dan Selandia Baru. (HAR/INU/NWO)



KOMPAS/STYLOK WILJANTU

Keluarga korban kerusuhan Mei 1998 menabur bunga di atas gambar-gambar korban saat melakukan aksi damai memperingati 9 tahun peristiwa tersebut di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (13/5). Mereka berharap pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM tersebut.

PENEGAKAN HAM

Sumber Buku Kerusuhan Mei 1998 Dianggap Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai, sumber penulisan buku berjudul *Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data, dan Analisa* tidak jelas. Hal ini membuat dia menolak memberi kata pengantar atas buku yang diterbitkan Solidaritas Nusa Bangsa serta Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

"Saya tidak tahu sumber penulisan buku itu. Yang pasti, hasil penyelidikan tim Komnas HAM adalah milik dan menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Namun, jika memakai sumber lain, maka isi buku itu merupakan tanggung jawab penyusunnya," kata Abdul Hakim, Jumat (11/5).

Jika buku yang antara lain disusun Ester Jusuf itu mengambil data dari Komnas HAM, lanjut Abdul Hakim, maka Komnas

HAM seharusnya juga ditulis sebagai salah satu sumber.

Polemik masalah buku itu muncul karena saat peluncurannya pada Kamis malam, Ester menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum atas penerbitan bukunya. Dia juga menegaskan, sumber penulisan buku setebal 470 halaman tersebut berasal dari hasil investigasi Tim Advokasi Kerusuhan Mei 1998 yang diketuai Raymond Simanjorang, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, media massa, dan fakta-fakta lain yang telah dipublikasikan.

Penegasan Ester itu dimaksudkan untuk menanggapi surat berkop Komnas HAM tertanggal 16 Januari 2007. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Biro TU dan Persidangan Komnas HAM Sriyana ini disebutkan, Abdul Hakim tidak dapat memberi kata pengantar pada buku itu.

Alasannya, karena proses hukum kerusuhan Mei 1998 belum final.

Selain itu, juga karena ketentuan penjelasan Pasal 20 Ayat 1 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan, dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah.

Bahkan, mengingat posisi Ester Jusuf selaku mantan Sekretaris Tim Ad Hoc, dalam surat itu juga ada harapan agar buku itu tidak diterbitkan. Sebab, substansinya sama dengan hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa kerusuhan Mei-1998.

Sementara itu, puluhan anggota keluarga korban, sebagian besar anak-anak dan para ibu, bersama sejumlah aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggelar peringatan Tragedi Mei 1998 dan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia lain di sejumlah tempat di Jakarta. (DWA/NWO)

KEMATIAN MUNIR

Suciwati Banding, Tak Puas atas Putusan PN

JAKARTA, KOMPAS - Suciwati, istri pejuang hak asasi manusia Munir, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mengabulkan sebagian gugatan perdatanya kepada PT Garuda Indonesia. Suci tidak puas dengan putusan itu karena inti gugatannya, yaitu audit internal manajemen PT Garuda dan permintaan maaf di depan publik, tidak dibubarkan.

Demikian diungkapkan oleh kuasa hukum Suciwati dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Asfinawati, Rabu (16/5). Pada 3 Mei lalu, PN Jakpus menyatakan, pilot GA 974 (penerbangan Jakarta-Amsterdam yang ditumpang Munir) Panutan Matondang dan PT Garuda lalai menjaga keselamatan penumpang. Hal ini mengakibatkan kematian Munir. Majelis hakim yang dipimpin Andriani Nardin memerintahkan PT Garuda membayar ganti rugi senilai Rp 664 juta kepada Suciwati.

ya
3-
a
psi.
dan
juta,
2.314
lain
itang
itang
dan
berabu-
1, se-
1 in-
yita
lawa
laman
pada
la di
1 Pe-
yan,
eluh-
asar
tin
har-
dan
ibeli
la-
per-
600
nah
Ni-
ada
8)

Menurut Asfinawati, spirit gugatan Suciwati adalah mendorong agar PT Garuda menyediakan layanan penerbangan yang lebih profesional. Untuk itu, sua-tu audit internal perlu dilakukan sehingga menyediakan layanan yang baik kepada konsumen menjadi satu-satunya kepentingan Garuda. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Garuda tidak boleh diampuri kepentingan dari pihak lain.

"Tidak dibubarkannya audit internal membuat spirit gugatan kami tidak tercapai," ujar Asfina.

Selain itu, permintaan Suci agar Garuda meminta maaf di depan publik juga ditolak. Padahal, majelis telah menyatakan Garuda bersalah dan perbuatannya merugikan Suciwati.

Asfina menambahkan, majelis juga tidak memasukkan beberapa fakta yang terjadi dan diakui dalam sidang dalam konstruksi putusan. Misalnya, keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto selaku ektra kru yang didasarkan surat penganan yang cacat hukum. Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta pemindahan tempat duduk Munir.

KASUS VLCC

Jaksa Minta Keterangan Ahli dari Dephub

JAKARTA, KOMPAS - Dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker raksasa atau *very large crude carrier* (VLCC) Pertamina tahun 2004 masih diselidiki Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Abdul Gani, Direktur Perkapalan dan Pelautan Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, diminta keterangan sebagai ahli oleh jaksa penyidik Selasa (15/5).

Abdul Gani mengatakan, kewenangan mengawasi kapal berda-



Patung mendiang Munir menghiasi ruangan Kontras, Jakarta, saat Kasum, kuasa hukum Suciwati (istri Munir), memberikan keterangan terkait gugatan kliennya terhadap PT Garuda Indonesia. Suciwati, Rabu (16/5), menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tuntutan tak dipenuhi sepenuhnya.

Saat ini, pelaku pembunuhan Munir kembali gelap. Pollycarpus semula dinyatakan bersalah oleh PN Jakpus dan dijatuhi hukuman 14 tahun. Namun, putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya. Jaksa kini tengah mempersiapkan bukti baru guna mengajukan

peninjauan kembali. Selain banding LBH Jakarta bersama organisasi konsumen juga berencana mengajukan gugatan *legal standing*. Gugatan tersebut dimaksudkan agar PT Garuda selaku BUMN dalam bidang pelayanan penerbangan membuat perubahan kebijakan. (ANA)

sarkan bendera negara yang dikibarkan kapal itu. "Karena VLCC itu berbendera Panama, negara Panama yang mengawasi. Bukan kewenangan Perhubungan Laut," katanya sesuai acara.

Menurut Abdul, ia memberikan keterangan sebatas keahliannya di Ditjen Perhubungan Laut. Jaksa menanyakan tugas dan fungsi bagian kerjanya di Dephub, terkait pengawasan kapal di Indonesia.

Direktur Penyidikan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan

POLITIK

Penegakan HAM Bukan Soal Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS - Penegakan hak asasi manusia adalah keberpihakan serta perjuangan dan bukan perihal pencitraan. Dalam pergaulan internasional, Indonesia dapat saja dikenal sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia tetapi pengakuan itu harus berbanding lurus dengan penegakan hak asasi manusia di dalam negeri.

Hal itu mengemuka dalam jumpa pers yang dipapar Kontras, Imparsial, HRWG, Etnos, Demos, dan Infid, Rabu (16/5) di Jakarta. Pencalonan kembali koanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2007-2010 menurut disambut baik, namun diharapkan langkah itu bukan hanya liris dan janji saja.

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan Kepala Operasional Kontras, Indira Ferida, disebutkan, ada bukti bahwa Pemerintah Indonesia mengingkari ikrar dan janji Indonesia saat pencalonan perdana pada 2006.

"Kejijakan pemerintahan yang mendukung impunitas terus terjadi," kata Indira.

Impunitas itu tampak dari masih terkatung-katungnya penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jaksa Agung Hendarwan Supandji bahkan menolak merendakanjuti penyelidikan

kasus itu dengan alasan mengada-ada. "Taka Agung telah men-delegitimasi penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat oleh Komasa HAM dengan menggunakan makna mekanisme pidana biasa," kata Indira lagi.

Di sisi lain, DPR tetap mengabaikan isu-isu ini sebagai komoditas politik dan Presiden tidak mengambil langkah aktif untuk membuka kasus itu.



Jaksa Agung telah mendelegitimasi penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat.

Indira Ferida

Sementara itu, di tempat terpisah, Jaksa Agung Hendarwan Supandji menyatakan pihaknya tidak pernah mengatak-ak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia selama ini. Apa yang dilanjutnya mengenai rambu-rambu hukum yang sudah ada. (GUS/HA)

KORUPSI BANK MANDIRI

Kejagung Sita Dokumen Berkaitan dengan PT Kiani

JAKARTA, KOMPAS - Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan surat berharga yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengambilalihan aset PT Kiani Kertas oleh PT Bank Mandiri. Dokumen dan surat berharga itu disita dari kantor pusat PT Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (16/5).

Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Muhammad Salim, Kamis, menjelaskan, dokumen itu saat ini dititipkan di kantor pusat PT Bank Mandiri. Menurut Salim, dokumen yang disita dapat saja digunakan untuk pengembangan penyelidikan perkara dugaan korupsi lainnya, bukan hanya berkaitan dengan PT Kiani Kertas.

"Ada yang berhubungan dengan PT Kiani, ada juga yang lain. Kan ada pengembangan juga," ujar Salim.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Mansyur S Nasution yang diminta konfirmasi membenarkan jaksa telah menyita sejumlah dokumen Bank Mandiri terkait pemeriksaan ECW Nelo, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh

Taripan. Namun, Mansyur mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang disita kejaksaan.

Sal penyidikan tiga mantan direktu itu, Mansyur menyatakan, hal itu merupakan domain kejaksaan. PT Bank Mandiri mengambil alih aset PT Kiani Kertas yang masuk dalam program penjualan aset Badan Penyelesaian Perbankan Nasional tahun 2002. Penyidik Kejagung menemukan indikasi bahwa pengambilalihan aset PT Kiani Kertas tak sesuai ketentuan internal Bank Mandiri sehingga merugikan keuangan negara Rp 1,8 triliun. Tiga mantan Direktur PT Bank Mandiri, yakni ECW Nelo, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Taripan ditetapkan sebagai tersangka.

Belajar dari penanganan perkara dugaan korupsi di Bulog, semula penyidik menyita dokumen yang berkaitan dengan korupsi pengadain sapi potong impor. Namun, dalam perkembangan anyo, dokumen yang disita dapat digunakan untuk merangai kap dugaan korupsi lainnya yang berkaitan dengan Bulog.

(BA/IB)

PELANGGARAN HAM

Keluarga Korban Penculikan Datangi Mahkamah Agung

JAKARTA, KOMPAS – Keluarga korban penculikan, didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, mencari informasi ke Mahkamah Agung soal putusan mengenai Tim Mawar yang ikut dalam operasi penculikan aktivis tahun 1997.

Meski sudah mengirimkan surat ke MA untuk bertemu dengan pejabat-pejabat MA, para ibu korban ini dipingpong ke sana-sini tanpa sedikitpun diberi informasi tentang kasus penculikan putra mereka.

Ibu Nurhasanah (51), orangtua Yadin Muhyidin, dan Ibu Tuti Koto (73), orangtua Yani Afri, didampingi oleh para aktivis Kontras datang ke MA pukul 11.00, Selasa (22/5). Semula mereka ingin bertemu dengan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mariana Sutadi, tetapi karena Mariana tidak ada, mereka diarahkan ke Kepala Bagian Humas MA Nurhadi. Namun, Nurhadi tidak ada di tempat. Akhirnya mereka ke ruangan juru bicara MA Djoko Sarwoko, namun mereka harus menunggu sekitar 1 jam karena yang dicari sedang rapat.

Setelah Djoko Sarwoko selesai rapat, mereka tetap sulit bertemu dengan Djoko karena harus menunggu pencarian berkas yang dilakukan oleh staf MA. Hingga pukul 13.00 mereka tetap tidak bisa bertemu. Akhirnya, Haris Azhar dari Kontras dan para ibu ini meminta waktu agar bisa bertemu dengan Djoko Sarwoko. Permintaan ini ditolak oleh staf Djoko, Muljoto. Akhirnya terjadi adu mulut karena Muljoto bersikeras menolak mereka bertemu Djoko Sarwoko.

Mendengar ribut-ribut tersebut, Djoko keluar dari ruangan dan menemui para ibu dan aktivis

Kontras. Ibu Tuti Koto mengatakan dia datang ke MA bukan mau ribut, tetapi hanya ingin tahu apa sebenarnya putusan terhadap sembilan anggota Tim Mawar yang telah divonis Mahkamah Militer II Jakarta.

Djoko Sarwoko berjanji akan mengusahakan mencari tahu putusan dan berkas putusan para terdakwa. Djoko mengatakan, kalau sudah ketemu, keluarga korban bisa langsung bertanya ke Kepala Bagian Humas MA Nurhadi.



Djoko Sarwoko berjanji akan mengusahakan mencari tahu putusan dan berkas putusan para terdakwa.

Kemarin, di sela-sela acara serah terima Kepala Dinas Psikiater Angkatan Darat di Bandung, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso mengatakan, anggota Tim Mawar, pelaku penculikan sejumlah aktivis tahun 1997, yang kini tetap menjalankan tugas di Angkatan Darat adalah mereka yang telah mengajukan banding dan telah menjalani hukuman. Namun, bila ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan hukum, pihak TNI Angkatan Darat akan menindak tegas karena tahun 2007 adalah tahun perang terhadap pelanggaran.

(VIN/CHE)



Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban beraksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Aksi yang telah berlangsung hari ke-18 setiap hari. Karnis ini terus menyuarakan agar pemerintah segera menguati tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Air.

PELANGGARAN HAM

Promosi Eks Tim Mawar Singgung Keadilan

JAKARTA, KOMPAS - Direktur eksekutif lembaga monitoring hak asasi manusia, Rachland Nasibek, menilai promosi yang diberikan Markas Besar TNI kepada sejumlah perwira terpidana mantan anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus atau Kopasus TNI Angkatan Darat telah menyimpang rasa keadilan publik.

Hal itu disampaikan Rachland, Kamis (24/9), dalam siaran pers Imparal yang dikirimi Kompas. Menurut dia, pemberian promosi jabatan terhadap mereka yang terlibat dalam penindakan para aktivis tahun 1997-1998 itu sekaligus memunculkan pertanyaan apakah TNI saat ini tetap mengalamai krisis kredibilitas yang sedemikian hebat.

"Sampai-sampai dalam pengisian jabatan strategi Mabes TNI terpacu untuk harus mengutamakan wajah lama yang bahkan pernah menghadapi tuduhan pidana. Akan tetapi, memang sepenuhnya persoalan itu adalah bagian dari kekuasaan TNI sendiri," tulis Rachland.

Menurut Rachland, persoalan lain dalam kasus ini adalah semakin banyak jelasnya keterputusan institusi peradilan militer,

Aspek-aspek penting dari transparansi keadilan dalam hal ini tidak dipenuhi.

yang bahkan menghalang-halangi akses jiduk dan keluarga para korban untuk tahu.

"Sampai sekarang masyarakat tidak tahu apakah anggota Tim Mawar itu telah menempati semua upaya hukum. Sedangkan kalangan mereka kemudian dipisahkan bermula oleh pengadilan, apakah masing-masing dari mereka sudah benar-benar menjalani hukuman."

"Aspek-aspek penting dari transparansi keadilan dalam hal ini tidak dipenuhi, bahkan lebih jauh telah disebarkan dari pengetahuan publik. Belajar dari pengalaman buruk ini, adalah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap upaya reformasi peradilan militer," tulis Rachland.

Lebih lanjut kepada Kompas, Rabu lalu, Panglima TNI Mars-

dal Djoko Suyanto menyatakan, pada tahap bimbingan harga satu perhari TNI mantan anggota Tim Mawar saja yang dipekat yakni Mayor (Inf) Bambang Kristiono. Yang lainnya hanya mendapat tambahan jumlah bulanan.

"Jadi, mereka yang di pengadilan tingkat pertama dipekat dipekat di tingkat banding, hanya ditambah jumlah bulanan mereka, misalnya dari vonis 20 bulan menjadi 24 bulan. Selain itu, tiga bintang menyatakan mengundurkan diri setelah selesai menjalani hukuman," ujar Djoko.

Seperti diwartakan sebelumnya, kasus ini kembali mencuat ketika diketahui bahwa tiga perwira pertama mantan anggota Tim Mawar tersebut saat ini menduduki tiga jabatan strategis. Dua orang menjabat komandan distrik militer di Jepara dan Pacitan, dan seorang lagi menjadi Kepala Staf Korem Kodam XVI/Pattimura.

Pada putusan Mahkamah Militer Jakarta Timur, 6 April 1999, dari 11 prapuri tersebut, lima di antara mereka yang berpangkat kapten sampai mayor dipekat dan dibekukan berstatus, mulai dari 20 bulan hingga 22 bulan. (DWA)

UNJUK RASA

Keluarga Korban HAM Rindu Kejujuran Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS - Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berharap pemerintahan baru jujur dan tidak melihat berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, sejak seperti itu akan memunculkan keadilan dan bermartabat bagi pembelajaran bangsa di masa depan.

Ketika bersilaturahmi dengan pengungsi pendak pesantren, 22 Mei lalu, Presiden menyatakan rindu pada kejujuran dan ketulusan rakyat dalam menyampaikan penilaian dan kritik. Sebaliknya, hal serupa sudah lama kurang dilakukan dari pemerintah," kata Sumarsh, Ibu BH Norma Imanawati, korban tragedi Semanggi 1, Ratu (GHS).

Iti di sela-sela aksi dium yang dia lakukan berhari-hari sekitar 30-35 orang di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan setiap hari. Karnis ini sudah berlangsung 18 kali. Namun, sampai kemarin belum juga ada tanggapan dari pemerintah.

Tiada kejujuran dan ketulusan dari pemerintah itu, lanjut Sumarsh, membuat banyak cita-cita reformasi terabaikan, misalnya terciptanya keadilan bagi rakyat. Pemerintah menghambat reformasi. Misalnya, menghambat proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto dan enggan menguati pelanggaran HAM di masa lalu. (DWA)

KORUPSI JPS

Dirjen Anggaran Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS - Direktur Jenderal Anggaran dan Perencanaan Keuangan Departemen Keuangan Achmad Rochjadi diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9). Ia diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi dana Hibah Bank Dunia untuk proyek jaring pengaman sosial atau JPS tahun 2002 di Jakarta.

Kepala Kejati DKI Jakarta Darmanto menjelaskan, setelah Achmad Rochjadi, penyidik masih perlu memeriksa Dirjen Perencanaan dan Deplan tahun 2005, yakni Muli P Nasution. Dijadwalkan, Muli P Nasution yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Deplan-diperiksa pekan depan sebagai saksi.

Proyek JPS itu senilai 573,025 dollar Amerika Serikat. Jumlah yang dialokasikan baru 203,636 dollar AS dan diduga dikorupsi. Achmad Rochjadi diperiksa di

rumah pilana khusus di Lantai 2 Gedung Kejati DKI Jakarta sejak pukul 10.00 hingga 16.00. Rochjadi tak mau menguati pertanyaaan wartawan.

Rochjadi diperiksa juga Harjanto Harjanto dan Febrin Johri Siahaan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 untuk membayar kembali dana JPS yang sebelumnya disalurkan Bank Dunia.

Darmanto mengatakan, sebagai Dirjen Anggaran dan Perencanaan Keuangan Deplan, Achmad Rochjadi mengetahui pencairan dana APBD tahun 2005 untuk menguati dana Bank Dunia yang dialokasikan dalam program JPS tahun 2002.

Mengenai perlu tidaknya terangan pihak Bank Dunia, Darmanto menegaskan bahwa hal itu perlu. Namun, ada semacam kekebalan pihak Bank Dunia. (DWA)

Advertisement for BEST HOMESTAY, Seattle, Boston, UCLA Stay On Campus, Cambridge - London, Beijing, Australia, Singapore, and JW Marriott - Jakarta.

Tindak Mafia Peradilan



Sejumlah orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Adili Soeharto dan Korban-korban Pelanggaran HAM berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (27/9). Mereka menyampaikan keprihatinannya atas vonis Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Soeharto atas majalah Time.

PENCARIAN KEADILAN

Hari-hari Korban Kerusuhan Mei...

Sembilan tahun sudah berlalu, namun para korban kerusuhan Mei 1998 masih mencari keadilan. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang diambil saat itu. Para korban juga menuntut agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang diambil saat itu.



Bersama Abdifauz Kamil

Korban kerusuhan Mei 1998 menuntut agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang diambil saat itu. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang diambil saat itu.

Adalah Iwan Firmansyah, pria kelahiran Tondong, Sulawesi Selatan, yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998. Saat itu, ia sedang berada di rumah bersama keluarganya. Ia mengalami luka-luka akibat kerusuhan tersebut.

polisi yang bertugas saat itu yang melakukan penangkapan. Ia merasa kecewa karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah saat itu.



Kesendirian Iwan



Mengingat Tragedi Mei 1998



Melayani Warga Beribadat Ramadan Cina

TAMBAH BESAR BONUSNYA!

DAPAT LANGSUNG

Aksi Kamisan Ke-25



Aksi Kamisan yang dilakukan setiap Kamis sore di depan Istana Merdeka, Jakarta, telah memasuki minggu ke-25, Kamis (12/7). Aksi yang dilakukan korban dan keluarga korban HAM tersebut meminta pemerintah untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung terungkap tuntas.

PEMBUNUHAN MUNIR

Ongen Akui Berada di Tempat yang Salah

JAKARTA, KOMPAS — Seorang saksi dalam perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Raymond JJ Latuihamallo atau Ongen (51), Rabu (6/6), tampil terbuka dalam jumpa pers. Ia didampingi pengacaranya, Ozhak Emanuel Sihotang; istrinya, Etha Pattinasarany (39); serta kedua putrinya, Inri Milasi L (23) dan Sabilsa Wiara L (17). Jumpa pers sempat ditunda, menunggu Inri selesai kuliah.

Ongen menegaskan, ia tak mengenang Polycarpus Budihari Priyanto, pilot PT Garuda Indonesia yang diduga terlibat pembunuhan Munir, hingga saat ini. Ia juga mengatakan tak pernah berinteraksi fisik atau berkomunikasi dengan Munir. Ongen merasa hanyalah orang yang sedang berada di tempat yang salah menjelang kematian Munir.

"Saya memang seperti berada di tempat yang salah. Tetapi, itu saya tabah. Saya mencoba lebih

dekat dengan Tuhan," katanya.

Ongen memutuskan muncul terbuka setelah ia beberapa kali memberi keterangan pada kepolisian sejak 2 April lalu. Setelah itu, ia yang berprofesi sebagai penyanyi sempat pentas ke Belanda dan kembali lagi ke Indonesia pada 20 April 2007. Dua penyidik polisi mengajak Ongen untuk menjalani prarekonstruksi di Bandara Changi, Singapura, tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Namun, saat itu mereka hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat situasi bandara sebab lokasi Coffee Bean, yang disebut-sebut merupakan persinggahan Munir, telah berpindah lokasi.

Ongen mengaku menyaksikan Munir dengan seseorang di Coffee Bean itu. Tetapi, ia mengaku tidak pernah berinteraksi dengan Munir saat itu. Keberadaannya di Changi dalam rangka kepergiannya ke Belanda. (SF)

PERANG KORUPSI DKP

Pohon Tragedi



Korban dan keluarga korban hak asasi manusia yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban kembali melakukan aksi diam Kamis di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/10). Dalam aksinya yang ke-37 tersebut mereka membawa pohon tragedi yang berisi daftar tragedi pelanggaran HAM yang belum tuntas diusut pemerintah.

KEPI

Wa

JAK. Presi kaka keja atas ten' rin' J sa an ki se

F

I

1

KOMPAS/TUTOK WIJAYANTO

IGAN Targetkan UU Selesai

Memang saya, akan lebih cepat di Komisi III karena semua sudah mengasasi ini," ujarnya. Revisi terhadap tiga UU hukum menjadi prioritas setelah MK menyatakan, pasal-pasal pengawalan di dalam UU Komisi Yudisial (KY) bertentangan dengan UUD 1945. UU itu dimintakan uji materi oleh 21 hakim agung yang menilai bahwa hakim agung dan hakim konstitusi bukan termasuk hakim yang dimaksud KY.

Albat putrasan tersebut, KY ehilang salah satu fungsi pengawasan KY tidak lagi menagil, memeriksa, dan merekomendasikan hakim yang diberikan masyarakat melakikan langganan perilaku.

Anggota KY, Soekoro Soeparto mengatakan bahwa pihaknya memang revisi tersebut. KY h mengupayakan draft versi yang mendapat masukan dari hakim tata negara se-Indonesia.

Jika benar Hendaman termasuk salah satu draft versi KY, ia ditunjukkan untuk perkuat posisi KY. Dalam tersebut, KY tidak diharuskan mendanai narasumber untuk menjangkau narasumber (ANA).

Si Arah membantu presiden, wewenang tetap terbatasi. PAN menentang kakelewatkan maupun leku lebih berperan kapercayaan masyarakat PAN belum maksimal.

Abdul Rahman Saleh sebelumnya menjabat Jaksa Agung. Pada Mei 2007, ia diganti oleh Hendaman Supandi. "Polycarpus ja-

Semua Bantah Polly

Jubir Presiden: Tak Ada Hubungan dengan Yudhoyono-Kalla

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah pihak yang namanya disebut sebagai "orang kita" oleh Polycarpus Budihari Priyanto dalam rekaman yang diputar di sidang peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Rabu (22/8) di Jakarta, membantah keras.

Jaksa Agung Hendaman Supandi kepada wartawan di Gedung MPR/DPK, Kamis, membantah keras jika dirinya sebagai "orang kita", sebagaimana disebut Polycarpus dalam rekaman Diskor yang ditayangkan di direktur Utama PT Garuda Indonesia.

"Jika benar Hendaman termasuk orang kita versi Polycarpus, ia ditunjukkan untuk ajukan peninjauan kembali. Jadi, silakan Anda simpulkan sendiri," katanya.

Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga beresok. Kepada Kompas ia mengatakan, dalam menangan perkara pembunuhan Munir tidak ada perbedaan sikap antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jaksa Agung, baik saat masih menjabat dirinya maupun dijabat Hendaman Supandi.

"Garis Presiden Yudhoyono tegas, yaitu bongkar kasus pembunuhan Munir sampai ke akar-akarnya karena kasus ini mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia," kata Abdul Rahman Saleh melalui telepon dari Yogyakarta.

Abdul Rahman Saleh sebelumnya menjabat Jaksa Agung. Pada Mei 2007, ia diganti oleh Hendaman Supandi. "Polycarpus ja-



Suciwati, istri mendiang aktivis HAM Munir, mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/8). Persiklaman aksi kamisan Munir kembali digelar berdasarkan buletur baru pada Rabu lalu dan akan dilanjutkan Rabu mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

ngan berkhayal. Seakan-akan saya diganti karena saya bukan orang dia. Itu analisis dia saja," kata Abdul Rahman yang menyangkal pernyataan Polycarpus sebagai upaya memecah belah.

Di Bandung, Wakil Ketua DPR Mahalini Iskandar berbarap penyelesaian kasus pembunuhan Munir tidak dicampuri kepentingan politik.

Ketua majelis kasasi perkara pembunuhan berencana terhadap Munir, Iskandar Kamil, mengatakan, pihaknya sangat independen ketika memutus perkara yang melibatkan terdakwa Polycarpus. Ia menegakkan, majelis hanya melihat persoalan (teknis) hukum semata.

Pernyataan Polycarpus yang mengatakan orang Mahkamah Agung adalah "orangnya", ungkap dia, hanya klaim sepihak. "Lain

kan juga bisa mengatakan bapak itu (Iskandar Kamil) teman saya," katanya.

Ditanya pendapatnya mengenai buletur baru yang diajukan jaksa, Iskandar tidak bersedia berkomentar. "Saya terikat kode etik," katanya.

Anggota majelis kasasi, Artidjo Alkantar, mengatakan, dirinya mungkin ia loke ketika memutus perkara dan tetap mempertahankan dissenting opinion.

Ditanya putusan kasasi terhadap Polycarpus, Oktober 2006, majelis menyatakan Polly tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Munir. Majelis kasasi terdiri dari Iskandar Kamil (ketua), Artidjo Alkantar, dan Atja Sontjaja. Dalam putusan itu, Artidjo mengajukan dissenting opinion yang intinya Polycarpus terbukti bersalah.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallaranggy menyatakan, pe-

nyebutan nama Presiden (SBY) dalam rekaman aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, harus mau diperiksa oleh institusi penyalak seperti kepolisian.

"Ini tantangan politik. Yang jelas, seorang agas BIN biasanya langsung diganti jika masyarakat mengatai eksistensinya. Sebab, kerja intelligen adalah kerja yang terutupi," jawab Soeparto saat ditanya bagaimana cara membuktikan keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir.

Mantan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, Anasua Nababan menuturkan, TPF menyimpulkan BIN meng-

gunakan nama Presiden (SBY) dalam rekaman aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, harus mau diperiksa oleh institusi penyalak seperti kepolisian.

KASUS MUNIR BIN Tak Boleh Represif

JAKARTA, KOMPAS - Penegamat intelligen, Ignatius Soeparto, menuturkan, lembaga intelligen, seperti Badan Intelligen Negara atau BIN, seharusnya hanya bertugas memberi peringatan awal kepada presiden atau lembaga pengguna intelligen lainnya. BIN tidak boleh melakukan kegiatan represif, seperti penangkapan atau penahanan, sebab bukan lembaga penegak hukum.

Tada masa Orde Baru dan mungkin juga sebelumnya, lembaga intelligen memang sering melakukan tindakan represif. Jadi, jika sekarang mungkin masih dilakukan, itu akibat peninggalan masa lalu dan harus segera dikembalikan," kata Soeparto yang juga perawatirawan brigadir jenderal TNI, Rabu (22/8).

BIN, kata Soeparto, harus menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan demokrasi. Jika ada dugaan lembaga itu terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, harus mau diperiksa oleh institusi penyalak seperti kepolisian.

"Ini tantangan politik. Yang jelas, seorang agas BIN biasanya langsung diganti jika masyarakat mengatai eksistensinya. Sebab, kerja intelligen adalah kerja yang terutupi," jawab Soeparto saat ditanya bagaimana cara membuktikan keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan Munir.

Mantan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, Anasua Nababan menuturkan, TPF menyimpulkan BIN meng-

Bagir Diminta Tak Peduli Pernyataan

KASUM Minta Sidang PK Polycarpus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Mahkamah Agung atau MA Bagir Marwan diminta menandatangani pernyataan menentang pilot Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Derikhan dibelakan pembuat busur Polycarpus (Munir) dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 320X di Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Asesori menengah perkara PK Polycarpus akan ditugaskan secara resmi. Putusan PK di akhir sidang akan ditinjau ulang oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir.



Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang antara lain terdiri atas (dari kiri ke kanan) Suciwati, Anasua Nababan, Prahjoko Indrawati, dan Usman Hamid menghadiri press conference KontraS Jakarta, Kamis (23/8). KASUM menandatangani surat pernyataan menuntut Ketua Mahkamah Agung Bagir Marwan sebagai saksi tunggal dalam sidang perkara pembunuhan terdakwa Munir.

AKSI KAMISAN Presiden Dituntut Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS - Sekelompok orang yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menuntut Ketua Mahkamah Agung Bagir Marwan sebagai saksi tunggal dalam sidang perkara pembunuhan terdakwa Munir. Mereka menuntut Ketua Mahkamah Agung Bagir Marwan sebagai saksi tunggal dalam sidang perkara pembunuhan terdakwa Munir.

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang antara lain terdiri atas (dari kiri ke kanan) Suciwati, Anasua Nababan, Prahjoko Indrawati, dan Usman Hamid menghadiri press conference KontraS Jakarta, Kamis (23/8). KASUM menandatangani surat pernyataan menuntut Ketua Mahkamah Agung Bagir Marwan sebagai saksi tunggal dalam sidang perkara pembunuhan terdakwa Munir.

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang antara lain terdiri atas (dari kiri ke kanan) Suciwati, Anasua Nababan, Prahjoko Indrawati, dan Usman Hamid menghadiri press conference KontraS Jakarta, Kamis (23/8). KASUM menandatangani surat pernyataan menuntut Ketua Mahkamah Agung Bagir Marwan sebagai saksi tunggal dalam sidang perkara pembunuhan terdakwa Munir.

Bagir Diminta Tak Peduli Pernyataan

KASUM Minta Sidang PK Polycarpus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Mahkamah Agung atau MA Bagir Marwan diminta menandatangani pernyataan menentang pilot Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Derikhan dibelakan pembuat busur Polycarpus (Munir) dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 320X di Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Asesori menengah perkara PK Polycarpus akan ditugaskan secara resmi. Putusan PK di akhir sidang akan ditinjau ulang oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir.

Bagir Diminta Tak Peduli Pernyataan

KASUM Minta Sidang PK Polycarpus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Mahkamah Agung atau MA Bagir Marwan diminta menandatangani pernyataan menentang pilot Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Derikhan dibelakan pembuat busur Polycarpus (Munir) dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 320X di Garuda Indonesia, Polycarpus Budihari Priyanto, yang mengoyakkan busur dari orang di MA sebagai orang kita. Bagir diharapkan dapat bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus.

Asesori menengah perkara PK Polycarpus akan ditugaskan secara resmi. Putusan PK di akhir sidang akan ditinjau ulang oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir. "Saya akan tetap bersikap obyektif dalam memeriksa perkara Polycarpus," kata Bagir.

Advertisement for RIMOTAT Sale, featuring a television set and promotional text: 'RIMOTAT Sale 2 November - 2 Desember', 'Mengankan puluhan unit TV Flat 21" yang diundi kunjungan di semua cabang!', 'Rabat Rimbong Rimo Smart Card, setiap pembelian minimum Rp 500.000,- (Rp 500.000,-) mendapatkan 1 Rimo Rimbong Card', 'Sale up to 50% dari merek-merek favorit!!'

Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM



DANAR KUMORO AJI

Solidaritas Jaringan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/12). Mereka menuntut pemerintah menuntaskan kasus penembakan mahasiswa Trisakti, pembunuhan Munir, juga tragedi Tanjung Priok. Mereka tak lelah terus menuntut keadilan.

D

Part

JAKA
berlor
transj
tidak
kare

Pas
Unda
disetu
yat d
parta
kuan
nyun
yang
pada

"A
part
ann
seku
forr
(13/
M
aka
me
pu
kar
da

an

KASUS SEMANGGI

Apalagi yang Dibutuhkan Negara?

S elasa (13/11) sore, ruas Jalan Jenderal Sudirman di depan Kampus Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta riuh oleh deru mesin dan nyaring klakson mobil. Sembilan tahun lalu, di ruas jalan itu, di tempat yang sama, pun riuh, bukan oleh bunyi deru mesin dan klakson mobil, tetapi oleh seruan mahasiswa dan warga yang meneriakkan reformasi.

Semakin sore suasana kian memanas dan bentrokan antara aparat keamanan dan warga serta mahasiswa tak terhindar. Diawali semburan air yang membuat gatal dari *water canon* yang sebelumnya disiagakan di bawah Jembatan Semanggi, rentetan tembakan dan desing peluru mulai membelah udara. Sejumlah mahasiswa roboh, salah satunya Teddy Mardani (mahasiswa ITI Serpong), yang ditemukan tertelungkup di aspal Jembatan Semanggi saat barisan terdepan mahasiswa beranjak mundur. Sebutir peluru mengenainya, darah mengucur di antara sengal napasnya.

Beberapa mahasiswa membawanya ke tepi, mencegat sebuah ambulans yang melaju dari arah Jembatan Semanggi. Dalam perjalanan ke Rumah Sakit Jakarta, seorang mahasiswa menyerukan azan di telinga Teddy.

Sesampai di Rumah Sakit Jakarta, Teddy berpulang. Jenazahnya dibaringkan di sebuah kasur. Tak berapa lama, datang lagi korban lainnya, BR Norma Irmawan (mahasiswa UAJ). Pada kausnya yang putih tampak beberapa titik merah. Sebutir peluru menembus dada kirinya.

Beberapa mahasiswa pun menangis dan yang lain larut dalam doa. Dan di kejauhan, Jalan Jenderal Sudirman, masih riuh oleh suara tembakan dan denting tiang-tiang besi yang ditabuh. Suasananya miris.

Sembilan tahun berlalu, dan Jalan Jenderal Sudirman kembali riuh oleh deru mesin mobil. Sembilan tahun berlalu dan kematian kedua mahasiswa itu belum juga menemukan ujung jawaban. Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelidikannya menemukan indikasi pelanggaran HAM, bahkan pelang-



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Foto-foto korban kasus kerusakan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dipajang dalam peringatan peristiwa Tragedi Semanggi I di halaman Kampus Atma Jaya Jakarta, Selasa (13/11).

garan HAM berat, hingga kini belum kunjung ada jawaban tegas atas perkara itu. Padahal, berkas perkara tragedi Semanggi itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

"Untuk itu kami meminta kepada Kejaksaan untuk menyampaikan kepada publik, sejauh mana tindak lanjut penanganan kasus itu. Harapannya, beban korban dan keluarga korban, juga masyarakat, diringankan, sebab ada jawaban jelas atas perkara itu," ungkap komisioner

Komnas HAM, Ridha Saleh.

Yosep Adhi Prasetyo, komisioner Komnas HAM lainnya, mengungkapkan perbedaan persepsi tentang pelanggaran HAM berat antara Komnas HAM, Kejaksaan, dan DPR menjadi salah satu kendala penuntasan kasus itu. Karena itu, harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah demi penegakan HAM jika ingin kasus itu tuntas. HAM warga negara pun dihargai.

Apalagi yang dibutuhkan negara selain itu? (JOS)

PEMBUNUHAN MUNIR

Pengajuan Rohainil Hanya Tutupi Ketidakmampuan Aparat Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Pengajuan mantan Secretary Chief Pilot Airbus 330 Rohainil Aini sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir dinilai pengacaranya, Mohamad Assegaf, sebagai upaya untuk menutupi ketidakmampuan aparat penegak hukum mengungkap pembunuh aktivis hak asasi manusia itu.

Pengajuan Rohainil sebagai terdakwa hanya untuk mengesankan agar para penegak hukum itu telah berupaya keras dan serius mengungkap misteri pembunuhan Munir.

"Penetapan Rohainil sebagai terdakwa hanyalah 'produksi' dari ketidakmampuan itu," demikian pengacara Rohainil dalam sidang yang digelar, Kamis (25/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengacara Rohainil, Mohamad Assegaf, juga menegaskan, penetapan itu merupakan bentuk ketidakberanian jaksa penuntut umum membidik pelaku sebenarnya yang diyakini bertanggung jawab atas kematian Munir. "Pengajuan perkara itu oleh jaksa adalah salah," katanya.

Rohainil diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan membantu Pollycarpus Budihari Priyanto yang diduga membantu membunuh Munir. Assegaf menyebutkan, dalam resume berita acara pemeriksaan, Pollycarpus hanya diposisikan sebagai pembantu dalam kasus pembunuhan itu.

"Akan tetapi, penyidik tidak pernah memunculkan siapa sebenarnya yang telah dibantu oleh Pollycarpus," kata Assegaf.

Seusai sidang, Assegaf mempertanyakan, bagaimana mungkin mendakwa seseorang membantu, pembantu yang hingga kini belum diajukan siapa aktor utamanya. "Itu kesalahan fatal," katanya. Posisi seperti itu ada rekayasa motivasi.

Seharusnya, jaksa mengembalikan berkas itu dan tidak memaksakan mengajukan ke pengadilan. Assegaf menegaskan, seharusnya jaksa tidak terburu-buru ajukan kasus itu dan membuat dakwaan yang terkesan asal-asalan dan memaksakan diri.



KOMPAS/TOTOE WILJANTO

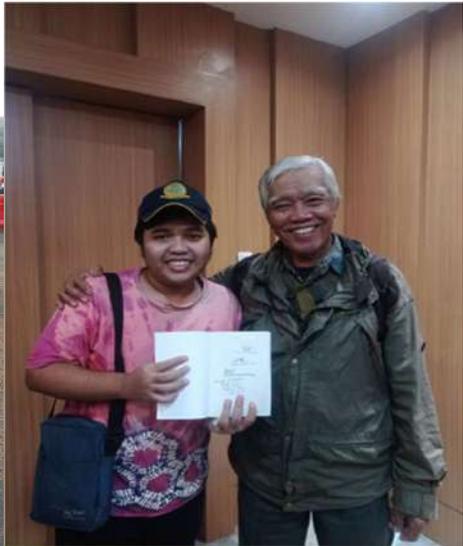
Aktivis dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban menyiapkan material untuk aksi diam Kamis di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/10). Pada aksi yang ke-38 tersebut, mereka tetap meminta pemerintah untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Assegaf meminta agar hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar antara lain menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan membebaskan Rohainil dari segala dakwaan dan memerin-

tahan agar jaksa melepaskan Rohainil dari tahanan.

Menanggapi itu, Jaksa Penuntut Umum Noor Rachmat menyatakan hal itu sebagai hal yang wajar dan boleh disampaikan.

(JOS)











Small white caption text.



Small white caption text.



Small white caption text.



Small white caption text.



Small white caption text.



Small white caption text.



Small white caption text.



Small caption text below the photograph.



Small caption text below the photograph.



Small caption text below the photograph.



Small caption text below the large photograph.



Small caption text below the photograph.



Small caption text below the photograph.



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar

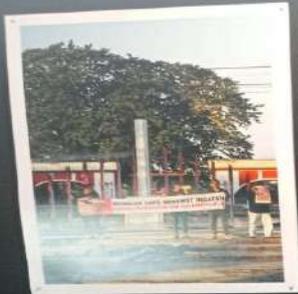


Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar

Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Keberhasilan Aksi dan Kegiatan
di lingkungan sekitar



Haris Setiawan



Haris Setiawan



Haris Setiawan



Haris Setiawan

KURATORIAL

Kamisan Orang Silih Berganti, Aksi Ini Tetap Berdiri

Aksi Kamisan telah berdiri selama 18 tahun secara konsisten untuk mengawal ingatan, melawan lupa dan menuntut keadilan. Dari Jakarta, Aksi Kamisan telah menyebar di puluhan kota di Indonesia dan luar negeri, berkembang menjadi sebuah gerakan berkelanjutan yang tidak hanya mawadahi perjuangan korban, tetapi juga menjadi ruang untuk publik dan generasi muda yang bersolidaritas dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Negara. Hari ini, kehadiran Aksi Kamisan menjadi semakin relevan sebagai ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam menyuarakan keadilan dan perubahan serta sarana untuk memberikan pendidikan politik dan HAM bagi masyarakat luas.

Paling tidak, terdapat tiga hal esensial dari Aksi Kamisan:

Pertama, saat kebanyakan elemen masyarakat sipil terseret atau permiaai akan kuatnya arus impunitas, Aksi Kamisan tidak pernah bergeser sedikit pun. Bahkan Aksi Kamisan justru semakin teguh mengahasi arus itu. Suara-suara Aksi Kamisan tidak kondur saat terdapat penjahat HAM memiliki kekuasaan sangat tinggi.

Kedua, area publik di seberang tetana merdeka yang senantiasa dikontrol oleh penguasa, telah direbut kembali oleh Aksi Kamisan. Ini menjadi satu-satunya pengambilan ruang publik terdepan di Indonesia.

Ketiga, menjalarnya perjuangan secara geografis dan beragam ekspresi, bagi beraneka warna dan latar belakang orang Indonesia. Mengapungkan bahwa proses dan dinamika ini terjadi secara organik dan menjamah jauh ke dalam hati.

Pameran foto ini berupaya untuk memvisualkan ketiga esensi Aksi Kamisan tersebut.

Satu hal berkesan yang patut dicatatkan selama proses pengkuratorian, ialah tak ada satu pun foto Aksi Kamisan yang menampilkan kekerasan dan kerusuhan. Semua foto bermuatan damai, menyuarakan dan keteguhan, juga sekecil jomblo. Keseluruhan ini yang menegaskan bahwa Aksi Kamisan tidak boleh berhenti sebagai gerakan sipil. Aksi Kamisan harus menjadi sebuah wadah yang mengakomodasi, teguh, damai, dan penuh harapan.

Hidup Korban, Jangkau Dism, Lewat!
Jakarta, 27 April 2022

Pemerla Foto

Haris Setiawan, Muhammad Rizki Al Mubarak, Amien Nudlis, Ferry Sunanda, Muhammad Haider Ebad A. Alp, Kurniawan, Wulan Kusuma Wardhani, Robby Yudhanta, Gildera Ganaba Gusama, Octaviana Salma, Rizki Anagrah Kusuma, Fathul Habibullah, Toni Santika Budi, Fauzwa Christa Adah, Raka Samudhan, Stephanie Ong, Iqra Rizqillah, Dharma Kirana, Akhmad Harefa Shauqi, Aksi Kamisan Kalimantan, Spatah, Sulhony Hasanudin, Daini Gohah, Aditya Putra Pratama, Michael Caturaya Herman Yudo, Fenny Jusman, Muhammad Mubashir Al Mubarak, Albert Marziah Nissa Adh Saputra, Adhira Harisugroho, Nity Amanda

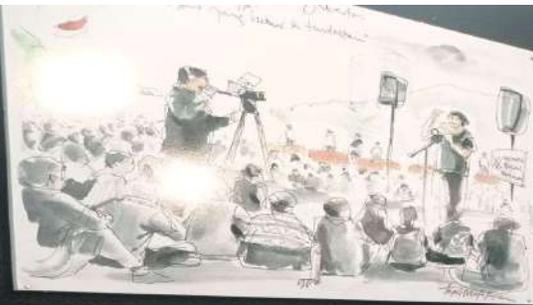
Pemerla Sutas

Toni Mahatun

Kurator

Erik Prasetya
Fahriul Haq
Fitriyani

Tertama Keleif,
Untuk semua para pithah yang terlibat dalam pameran ini.





Intelligentia - Dignitas

RIWAYAT HIDUP



Rizky Jalu Prasetyo, lahir di Jakarta pada 28 Oktober 2000. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Senen 03 Pagi pada 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Jakarta pada 2015, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 20 Jakarta pada 2018. Melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PENMABA UNJ (Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta) pada 2018.

Penulis sangat tertarik kepada studi historis terutama mengenai topik Sejarah Eropa, Sejarah Sains dan Teknologi, dan Sejarah Sosial dan Ekonomi, dan Sejarah Hindu dan Buddha. Meskipun lahir, besar, dan menetap di Indonesia, penulis memiliki pandangan bahwa dunia secara keseluruhan adalah Tempat dimana kita dapat mengeksperikan ide kita kepada khalayak luas tanpa perlu memandang batasan bangsa dan negara.

Apabila terdapat kritik dan/atau saran yang ingin disampaikan mengenai skripsi ini, penulis dapat dihubungi pada alamat email Rizkyjp09@gmail.com atau alamat fisik Jl. Prapatan II RT04/005 No. 33 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Jakarta maupun menghubungi langsung melalui WhatsApp di +62-877-6750-3524 atau Instagram @rizky_jalu.